Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)
Vol 2 No. 2 2024 ISSN 2988-1293 (online)
http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn

Sejarah Etika Politik dan Hubungannya dengan Islam

The History of Political Ethics and its Relationship with Islam

Astriani*[a], Ahmad Ginannafsih Shafar[a], Kurniati[a]

[a] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Correspondence: *10200122002@uin-alauddin.ac.id*

Abstract

Political ethics in Islam has become a relevant discussion in the context of modern politics. This paper explores the history and practical implications of political ethics in Islam and its relationship to contemporary politics. The history of political ethics in Islam teaches that values such as justice, brotherhood, deliberation and equality are the main foundations in Islamic politics. This research uses qualitative methods to analyze related literature as well as relevant hadiths and verses of the Koran. From this analysis, it was found that political ethics in Islam not only includes the worldly dimension which is related to the relationship between humans and fellow humans and the universe, but also the ukhrawi dimension which is related to the relationship between humans and Allah SWT. The implementation of ethical values in contemporary politics is necessary to maintain integrity, justice and shared prosperity in national and state life. This involves responsible and transparent leadership practices, healthy and inclusive democratic practices, peaceful conflict management, protection of minority rights, and adaptation to the challenges of globalization and information technology. In Indonesia, implementing ethical values in contemporary politics also involves applying the principles of Pancasila and adapting to local conditions and a culture that is rich in diversity. In an effort to build a more ethical and responsible political culture, cooperation between government, political institutions, civil society and the private sector is very necessary. Only with a strong commitment from all parties, can we create a more just, democratic and sustainable political system for a better future.

Keywords: *Political ethics, Islam, Contemporary*

Abstrak

Etika politik dalam Islam telah menjadi perbincangan yang relevan dalam konteks politik modern. Jurnal ini mengeksplorasi sejarah dan implikasi praktis dari etika politik dalam Islam serta hubungannya dengan politik kontemporer. Sejarah etika politik dalam Islam mengajarkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan persamaan adalah landasan utama dalam politik Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dari sumber sekunder berupa buku dan jurnal. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa etika politik dalam Islam tidak hanya mencakup dimensi duniawi yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan alam semesta, tetapi juga dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer diperlukan untuk menjaga integritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini melibatkan praktek kepemimpinan yang bertanggung jawab dan transparan, praktik demokrasi yang sehat dan inklusif, pengelolaan konflik yang damai, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, serta penyesuaian terhadap tantangan globalisasi dan teknologi informasi. Di Indonesia, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer juga melibatkan penerapan prinsip Pancasila dan penyesuaian terhadap kondisi lokal dan budaya yang kaya akan keberagaman. Dalam upaya membangun budaya politik yang lebih etis dan bertanggung jawab, kerja sama antara pemerintah, lembaga politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan. Hanya dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat menciptakan sistem politik yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

Kata kunci: Etika politik, Islam, Kontemporer

I. Pendahuluan

Sejarah etika politik dan hubungannya dengan Islam merupakan bidang penelitian yang memegang peranan penting dalam memahami evolusi politik dan pemikiran dalam konteks Islam. Latar belakang umum kajian ini terkait dengan kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana nilai-nilai etika politik telah memengaruhi perkembangan politik dalam dunia Islam, serta relevansinya dalam konteks sosial-politik saat ini[1]. Dalam

[1]Ulva Hasdiana, 'PENGANTAR ILMU POLITIK', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), 1–5 <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-

melihat konteks ini, penting untuk meninjau literatur terkait untuk mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang ini. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek tertentu dari hubungan antara etika politik dan Islam, tetapi terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana hubungan ini memengaruhi praktik politik di masa lalu dan masa kini. Dengan mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman kita tentang kaitan antara Islam dan politik, serta relevansi nilai-nilai etika Islam dalam konteks politik kontemporer.

Pada zaman awal Islam, etika politik telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam konteks politik dan pemerintahan. Mereka menunjukkan contoh kepemimpinan yang adil, berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Inilah dasar bagi pengembangan etika politik dalam Islam yang kemudian terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Periode kekhalifahan awal, khususnya masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, memberikan contoh nyata tentang bagaimana etika politik Islam diimplementasikan dalam praktik. Mereka memerintah dengan adil, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip etika Islam yang mendasar, seperti keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada masa-masa selanjutnya, seperti masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, terjadi perubahan dalam praktik politik, namun nilai-nilai etika Islam tetap menjadi landasan bagi beberapa penguasa Muslim. Misalnya, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad menjadi pusat intelektual Islam yang penting, di mana para cendekiawan Muslim seperti al-Farabi dan Ibn Sina mengembangkan teori politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam. Mereka menekankan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian dalam kepemimpinan, sesuai dengan ajaran Islam.

Pada masa kesultanan dan kekhalifahan selanjutnya di berbagai wilayah Islam, etika politik terus menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan pemerintahan. Contohnya, dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah, para penguasa sering mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam kebijakan pemerintahan mereka, yang didasarkan pada ajaran Islam. Mereka juga mengembangkan institusi-institusi politik yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam, seperti majelis-majelis konsultasi (majlis syura) dan sistem hukum yang adil.[2]

Namun, seperti dalam sejarah politik pada umumnya, tidak semua pemerintahan Islam selalu mengikuti prinsip-prinsip etika Islam dengan baik. Ada periode dalam sejarah Islam di mana penguasa tidak mematuhi nilai-nilai etika Islam, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai etika Islam telah ditekankan dalam ajaran Islam, penerapannya dalam praktik politik tidak selalu konsisten.

Dalam konteks dunia modern, hubungan antara etika politik dan Islam tetap menjadi topik yang relevan dan menarik untuk diteliti. Dengan berkembangnya politik global dan perubahan dalam dinamika sosial, pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat diterapkan dalam konteks politik kontemporer menjadi semakin penting. Penelitian terbaru dalam bidang ini telah mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman sejarah etika politik Islam dan aplikasinya dalam konteks masa kini.

Tantangan terbesar dalam memahami hubungan antara etika politik dan Islam di masa kini adalah menghadapi kompleksitas politik dan sosial yang ada. Di tengah-tengah dinamika globalisasi, polarisasi politik, dan perkembangan teknologi, nilai-nilai etika Islam sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, penelitian terbaru dalam bidang ini telah berusaha untuk

---

7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

[2]Ilham Budiman Panggabean and Aprilinda Martinondang Harahap, 'Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)', *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7.2 (2024), 1–15 <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>.

mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diaplikasikan dalam situasi politik yang kompleks dan beragam saat ini. Dengan demikian, latar belakang tentang sejarah etika politik dan hubungannya dengan Islam menjadi landasan yang penting dalam memahami peran etika dalam politik Islam pada masa kini.

Penelitian terkait telah mengungkapkan berbagai aspek tentang hubungan antara Islam dan politik, termasuk dalam konteks etika politik. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2018) mengulas sejarah politik Islam dan menyoroti peran penting etika dalam pembentukan sistem politik dalam masyarakat Muslim. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada deskripsi dan analisis sejarah daripada pembahasan yang mendalam tentang relevansi nilai-nilai etika Islam dalam politik kontemporer. Demikian pula, penelitian oleh Ahmad (2016) membahas konsep-konsep etika politik dalam Islam, namun lebih memusatkan perhatian pada aspek-aspek teoritis daripada penerapan praktis dalam konteks politik modern. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan penelitian yang menggabungkan analisis sejarah dengan aplikasi praktis dari nilai-nilai etika Islam dalam konteks politik yang lebih luas.

Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya integrasi antara analisis sejarah politik Islam dengan pemahaman tentang aplikasi praktis nilai-nilai etika Islam dalam politik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyelidiki bagaimana nilai-nilai etika politik Islam telah membentuk praktik politik dalam sejarah, serta relevansinya dalam konteks politik global saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara Islam dan politik, serta memberikan pandangan baru tentang bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat diaplikasikan dalam kebijakan dan praktik politik yang lebih luas.[3]

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur tentang Islam dan politik, khususnya dalam konteks etika politik. Dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami hubungan antara Islam dan politik, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi para akademisi, praktisi politik, dan pembuat kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat membentuk praktik politik yang lebih beradab dan berkeadilan, baik dalam skala lokal maupun global. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

II. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara sejarah etika politik dan Islam, serta aplikasinya dalam konteks politik kontemporer[4]. Dan disusun dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti menggunakan literatur bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang dibahas, serta buku-buku maupun dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mengumpulkan bahan bacaan, selanjutnya peneliti meninjau kembali hal hal yang perlu di analisis dan dikaji kembali sesuai dengan pemahaman yang peneliti dapatkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis dan nomatif syar'i, dengan menfokuskan pada pengkajian ayat-ayat, hadis, hasil ijtihad ulama dan data-data lainnya yang amat relevan dengan penelitian, sehingga penulis dapat menuturkan pokok-pokok pembahasan kesimpulan serta implikasi pada penelitian.

---

[3]Nurul Indana, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), 1–5 <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

[4]Ahmad Farid and others, 'Karakteristik Metode Tafsir Al-Quran Secara Holistik (Studi Literatur)', *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4.3 (2023), 1709–16 <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.409>.

III. Pembahasan

Sejarah Etika Politik Dalam Islam Telah Memengaruhi Praktik Politik Pada Zaman Modern

Sejarah etika politik dalam Islam merupakan cerminan dari bagaimana nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis telah membentuk dan memengaruhi praktik politik dalam sejarah Islam. Dalam konteks ini, penelusuran sejarah menjadi krusial untuk memahami bagaimana ajaran Islam telah diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks politik, serta bagaimana nilai-nilai etika tersebut berperan dalam pembentukan institusi politik dan perilaku politik dalam masyarakat Muslim. Sejak awal mula penyebaran Islam, etika politik telah menjadi fokus utama dalam ajaran Islam, dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil dan berbasis pada prinsip-prinsip moral yang tinggi.[5]

Pada masa kekhalifahan awal, terutama pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, prinsip-prinsip etika politik Islam diterapkan secara konsisten. Para khalifah ini memerintah dengan adil, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Mereka membentuk dasar-dasar untuk pengembangan etika politik dalam Islam yang kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Periode kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah juga menjadi titik penting dalam sejarah etika politik dalam Islam. Meskipun terjadi pergeseran dalam praktik politik, nilai-nilai etika Islam tetap menjadi landasan bagi beberapa penguasa Muslim. Di Baghdad, misalnya, kekhalifahan Abbasiyah menjadi pusat intelektual Islam yang penting, di mana para cendekiawan seperti al-Farabi dan Ibn Sina mengembangkan teori politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam. Mereka menekankan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian dalam kepemimpinan, sejalan dengan ajaran Islam.

Selama periode kesultanan dan kekhalifahan selanjutnya di berbagai wilayah Islam, etika politik terus menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan pemerintahan. Di Kesultanan Utsmaniyah, para penguasa sering kali mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam kebijakan pemerintahan mereka, yang didasarkan pada ajaran Islam. Mereka juga mengembangkan institusi politik yang mencerminkan nilai-nilai etika Islam, seperti majelis-majelis konsultasi (majlis syura) dan sistem hukum yang adil.

Namun, sejarah etika politik dalam Islam tidak selalu berjalan mulus. Ada periode dalam sejarah Islam di mana prinsip-prinsip etika Islam tidak dipatuhi dengan baik oleh penguasa, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan rakyat. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara etika politik dan Islam terus berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika sosial dan politik yang ada. Di tengah-tengah tantangan dan pergolakan, nilai-nilai etika Islam tetap menjadi pedoman bagi sebagian besar umat Islam dalam praktek politik mereka.

Dalam konteks dunia modern, hubungan antara etika politik dan Islam tetap menjadi topik yang relevan dan menarik untuk diteliti. Dengan berkembangnya politik global dan perubahan dalam dinamika sosial, pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat diterapkan dalam konteks politik kontemporer menjadi semakin penting. Penelitian terbaru dalam bidang ini telah mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman sejarah etika politik Islam dan aplikasinya dalam konteks masa kini.

Tantangan terbesar dalam memahami hubungan antara etika politik dan Islam di masa kini adalah menghadapi kompleksitas politik dan sosial yang ada. Di tengah-tengah dinamika globalisasi, polarisasi politik, dan perkembangan teknologi, nilai-nilai etika Islam sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, penelitian terbaru dalam bidang ini telah berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diaplikasikan dalam situasi politik yang kompleks dan beragam saat ini.

Dengan demikian, sejarah etika politik dalam Islam menjadi landasan yang penting dalam memahami peran etika dalam politik Islam pada masa kini. Melalui penelusuran sejarah yang cermat, kita dapat memahami

[5]Rosul Pilihan Daulay, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kandungan Hadis Jibril (Islam, Iman Dan Ihsan)', 2021, 114.

bagaimana nilai-nilai etika telah membentuk dan memengaruhi praktik politik dalam sejarah Islam, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks politik kontemporer. [6]

Ajaran Islam mencakup dua dimensi utama, yakni dimensi duniawi dan ukhrawi. Dimensi duniawi berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam semesta, sementara dimensi ukhrawi berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua dimensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal keduniaan yang didasari niat baik akan digolongkan menjadi amal akhirat, sebaliknya amal akhirat yang didasari niat buruk akan tergolong amal dunia.

كَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ بِصُوْرَة أَعْمالِ الدّنْيا وَيَصِيْرُ بِحُسْنِ النِيَّة مِن أَعْمَالِ الآخِرَة، كَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ بِصُوْرَة أَعْمالِ الأخرة ثُمَّ يَصِيْر مِن أَعْمَالِ الدُّنْيَا بِسُوْءِ النِيَّة

Artinya, "Banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat baik maka ia tergolong amal akhirat. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal akhirat, tapi ia tergolong amal dunia karena didasari niat buruk".

Oleh karena itu, setiap perbuatan mesti didasarkan pada niat baik agar mendapat hasil yang baik pula, termasuk dalam konteks politik. Islam mengatur beberapa etika umum dalam berpolitik, yang jika diterapkan dengan baik dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Nilai dasar kehidupan politik dalam Islam mengacu pada al-Quran dan as-Sunnah, memuat delapan poin utama: keadilan (al-'adalah), persaudaraan (al-ukhuwwah), persamaan (al-musawah), musyawarah (asy-syura), pluralitas (at-ta'adudiyyah), perdamaian (as-silm), pertanggungjawaban (al-mas'uliyyah), dan otokritik (an-naqd az-zatiy). Nilai-nilai ini merupakan fondasi yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan politik. Dalam Q.S. al-A'raf [7]: 29

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِا لْقِسْطِ ۖ وَاَ قِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّا دْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ ۗ كَمَا بَدَاَ كُمْ تَعُوْدُوْنَ

Terjemahannya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tuhan? ku me me rintahkan aku berlaku adil. Hadap kan lah wajahmu (kepada Allah) di setiap masjid dan berdoalah kepada-Nya dengan mengikhlaskan ketaatan kepada? Nya. Kamu akan kembali kepada?Nya se? bagai mana Dia telah men cipta kan kamu pada permulaan." Allah SWT secara tegas memerintahkan manusia untuk berlaku adil, "Qul amara Rabbī bil qisthi". Nilai keadilan ini harus diwujudkan dalam kehidupan politik, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan politik dilakukan dengan adil dan tidak memihak. Selain itu, pentingnya otokritik dalam Islam juga sangat ditekankan. Dalam Q.S. al-Isra' [17]: 14, Allah SWT berfirman,

"اقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا"

Terjemahan: "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".[7] Ayat ini menekankan pentingnya refleksi diri dan evaluasi terus-menerus dalam menjalankan amanah politik.

Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah Allah. Kekuasaan merupakan manifestasi dari misi kekhalifahan manusia yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kerahmatan bagi semesta. Oleh karena itu, kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip amanah, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Dalam Q.S. al-Mu'minun [23]: 115, Allah SWT berfirman,

"أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ"

Terjemahan: "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?".[8]

Tata pemerintahan yang baik adalah aspek penting dalam politik Islam. Pemerintahan harus dikelola dengan baik di semua sektor, termasuk politik, ekonomi, dan administrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik akan

[6]Koiy Sahbudin Harahap, Ilyas Husti, and Nurhadi Nurhadi, 'Desain Pendidikan Aqidah Spritual Dalam Hadits Dan Kurikulumnya', *Journal of Islamic Education El Madani*, 1.2 (2022), 83–98 <https://doi.org/10.55438/jiee.v1i2.28>.

[7]Quran Dan Terjemahan Kemenag', *Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI*, 2 (2019), 901.

[8]'Quran Dan Terjemahan Kemenag'.

melahirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya pemimpin dengan kualifikasi dan kriteria tertentu, seperti integritas, kapabilitas, jiwa kerakyatan, visi yang jelas, jiwa kenegaraan, kemampuan diplomasi, dan semangat reformasi.

Implementasi nilai-nilai ini dalam politik modern dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan praktek pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pemimpin yang adil dan amanah, kebijakan yang pro-rakyat, dan upaya untuk memastikan keadilan sosial adalah beberapa contoh bagaimana etika politik Islam dapat diterapkan dalam konteks modern.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai ini di era modern. Kehidupan politik yang berkembang masih sarat dengan nuansa yang sifatnya kontra-produktif. Dinamika politik yang kompleks, tekanan globalisasi, dan perkembangan teknologi membawa tantangan baru bagi pelaksanaan etika politik Islam. Meski demikian, nilai-nilai ini tetap relevan dan penting sebagai panduan dalam menghadapi tantangan tersebut. Melalui refleksi dan adaptasi yang tepat, nilai-nilai etika politik Islam dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.[9]

Dengan demikian, ajaran Islam tentang etika politik tidak hanya menjadi pedoman moral tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk tantangan-tantangan politik kontemporer. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, dan musyawarah menjadi pilar utama dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan politik berpihak pada kesejahteraan rakyat dan mencerminkan nilai-nilai luhur Islam.

Sejarah etika politik dalam Islam telah memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik politik pada zaman modern. Penelusuran sejarah ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang berasal dari ajaran Islam telah membentuk landasan yang kokoh bagi praktik politik dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang sejarah etika politik dalam Islam menjadi penting dalam merangkul nilai-nilai yang relevan dan menerapkan mereka dalam tantangan-tantangan politik modern.

Pada awal mula penyebaran Islam, etika politik telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak hanya menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebersamaan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam lingkup politik. Mereka memberikan contoh kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab, yang memengaruhi praktik politik pada masa itu dan menetapkan standar etika yang tinggi.

Selama periode kekhalifahan awal, nilai-nilai etika politik Islam terus diterapkan dengan konsisten. Khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan memimpin dengan teladan, mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi, dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan mereka. Pada masa ini, etika politik Islam membentuk dasar bagi pembentukan sistem politik yang berlandaskan moralitas dan integritas.

Periode berikutnya, termasuk masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, memberikan gambaran tentang bagaimana etika politik Islam terus berpengaruh dalam praktik politik. Meskipun terjadi pergeseran politik dan sosial, prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kebijaksanaan, dan toleransi tetap menjadi pilar penting dalam kepemimpinan Muslim. Pusat intelektual seperti Baghdad di bawah kekhalifahan Abbasiyah menjadi tempat di mana para cendekiawan Muslim mengembangkan teori politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.[10]

Di masa modern, sejarah etika politik dalam Islam tetap relevan dan mempengaruhi praktik politik dalam masyarakat Muslim. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab masih dijunjung tinggi dalam lingkungan politik. Misalnya, dalam beberapa negara dengan mayoritas Muslim, prinsip-prinsip etika

[9]Kurniati Kurniati, 'Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2018), 257 <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>.

[10]Ahmad Fitriawan, 'PROBLEMATIKA PENAFSIRAN AYAT-AYAT JIHAD DI ERA MODERN (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Konteks Ke- Indonesiaan Perspektif Mufassir Nusantara)', *Tesis*, 6.2 (2023), 248–65.

Islam tercermin dalam konstitusi negara, di mana perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang adil menjadi fokus utama.

Namun, tantangan-tantangan politik modern sering kali menguji kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik internasional membawa kompleksitas baru dalam politik modern yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Di beberapa negara, terutama di mana terjadi konflik politik atau ketidakstabilan, praktik politik dapat melanggar prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Namun demikian, sejarah etika politik dalam Islam tetap menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi praktisi politik, pemikir, dan aktivis masyarakat. Dalam menghadapi tantangan politik modern, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etika Islam dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang adil, membangun masyarakat yang berkeadilan, dan mempromosikan perdamaian serta kerjasama antarbangsa.

Dalam konteks politik global saat ini, di mana polarisasi dan konflik sering terjadi, sejarah etika politik dalam Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Prinsip-prinsip seperti rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) menegaskan pentingnya toleransi, inklusivitas, dan perdamaian dalam hubungan antarmanusia. Ini memiliki implikasi yang luas dalam pembentukan kebijakan luar negeri, diplomasi, dan kerjasama internasional, yang mungkin memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan dunia yang lebih aman dan berkelanjutan.

Dengan demikian, sejarah etika politik dalam Islam tidak hanya menjadi cermin dari masa lalu, tetapi juga menjadi pemandu bagi praktik politik pada zaman modern. Dengan memahami warisan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis dari masa lampau, masyarakat Muslim dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, di mana keadilan, kesetaraan, dan perdamaian menjadi landasan bagi tatanan politik yang inklusif dan berkeadilan.

Implementasi Nilai-Nilai Etika Dalam Konteks Politik Kontemporer

Politik kontemporer di Indonesia ditandai dengan dinamika yang kompleks dan beragam. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki lanskap politik yang unik dan beragam. Sejak reformasi 1998 yang menggulingkan rezim otoriter Suharto, Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam sistem politiknya, bergerak menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Dinamika politik di Indonesia saat ini mencakup berbagai isu seperti korupsi, keberagaman etnis dan agama, ketidaksetaraan ekonomi, serta pengaruh globalisasi dan teknologi.[11]

Pasca-reformasi, Indonesia mengadopsi sistem politik multipartai yang memungkinkan berbagai partai politik untuk berkompetisi dalam pemilu yang relatif bebas dan adil. Pemilu langsung untuk memilih presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah menjadi ciri khas dari sistem politik Indonesia. Hal ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah. Namun, sistem multipartai ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti fragmentasi politik dan koalisi pemerintahan yang sering kali tidak stabil. Partai-partai politik di Indonesia cenderung pragmatis dan koalisi yang terbentuk sering kali didasarkan pada kepentingan jangka pendek daripada visi ideologis yang jelas.

Korupsi tetap menjadi salah satu masalah terbesar dalam politik Indonesia. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, praktek korupsi masih marak terjadi di berbagai level pemerintahan. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, dan bahkan penegak hukum, menunjukkan betapa sistemik masalah ini. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menghambat pembangunan ekonomi serta sosial. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Keberagaman etnis dan agama juga memainkan peran penting dalam politik kontemporer Indonesia. Sebagai negara dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan berbagai agama yang diakui, isu-isu identitas sering kali

[11]Herdiansyah Hamzah, 'Politik Hukum Sumber Daya Alam', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 85 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11079>.

muncul dalam arena politik. Konflik horizontal, baik berbasis etnis maupun agama, masih terjadi di beberapa daerah, meskipun skala dan intensitasnya berkurang dibandingkan dengan masa lalu. Politik identitas menjadi alat yang sering digunakan oleh politisi untuk mendapatkan dukungan, namun hal ini juga berpotensi memecah belah masyarakat dan mengancam kohesi sosial. Peningkatan toleransi dan pemahaman antar kelompok masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.

Ketidaksetaraan ekonomi juga menjadi tantangan besar dalam politik Indonesia. Meskipun ekonomi Indonesia telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan miskin tetap tinggi. Distribusi kekayaan yang tidak merata ini menciptakan ketegangan sosial dan politik. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Globalisasi dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi politik kontemporer Indonesia. Pengaruh globalisasi terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga budaya. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi Indonesia untuk berintegrasi dengan ekonomi global dan menarik investasi asing. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan seperti persaingan ekonomi yang lebih ketat dan ketergantungan pada pasar internasional. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah cara berpolitik di Indonesia. Media sosial menjadi alat penting dalam kampanye politik dan mobilisasi massa. Namun, media sosial juga membawa tantangan baru seperti penyebaran disinformasi dan berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dan stabilitas politik[12]

Implementasi nilai-nilai etika dalam konteks politik kontemporer menjadi esensial dalam menjaga integritas dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam politik kontemporer, di mana dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi berkembang dengan cepat, kehadiran nilai-nilai etika sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin politik dan warga negara secara keseluruhan mencerminkan moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Salah satu aspek penting dari implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer adalah melalui praktek kepemimpinan yang bertanggung jawab dan transparan. Para pemimpin politik harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mereka harus memiliki integritas moral yang tinggi, mematuhi prinsip-prinsip keadilan, dan mampu bertindak secara adil dalam mengambil keputusan yang memengaruhi banyak orang. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap rakyat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer juga melibatkan praktik demokrasi yang sehat dan inklusif. Demokrasi tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Pemerintah dan lembaga politik harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap proses politik dan bahwa suara mereka didengar dan dihargai.[13]

Selain itu, dalam konteks politik kontemporer, implementasi nilai-nilai etika juga mencakup pengelolaan konflik secara damai dan konstruktif. Konflik politik adalah bagian alami dari kehidupan demokrasi, namun bagaimana konflik ini diatasi dapat menentukan stabilitas dan kohesi sosial. Pendekatan dialogis, mediasi, dan negosiasi harus diprioritaskan dalam penyelesaian konflik politik, daripada melalui kekerasan atau represi. Penghargaan terhadap pluralisme dan keberagaman pendapat juga menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Selain itu, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Politik yang adil dan inklusif harus memperhatikan kepentingan semua warga negara, termasuk mereka yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan atau memiliki

[12]Yunie risma riyantie, *Konsep Politik Machiaveli Dalam Prespektif Etika Politik Islam*, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020, XII <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>.

[13]Muhammad Azhar, '"Etika Politik Muhammed Arkoun"', *Jurnal Isyraqi*, no,1,10 Ju.0274 (2012), 22.

pandangan yang berbeda. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas, hak-hak perempuan, hak-hak LGBT, serta kelompok etnis dan agama tertentu menjadi penting dalam memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan negara.

Selanjutnya, dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi yang semakin maju, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer juga melibatkan pengelolaan tantangan baru yang muncul. Globalisasi membawa interkoneksi yang lebih besar antara negara-negara dan masyarakat, namun juga meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial serta menghadirkan tantangan terkait perdagangan bebas, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, teknologi informasi dan media sosial memberikan platform baru untuk berpartisipasi dalam proses politik, namun juga memunculkan risiko seperti disinformasi, privasi, dan polarisasi politik. Implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer memerlukan respons yang bijaksana terhadap tantangan-tantangan ini, dengan memastikan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi dimanfaatkan untuk kebaikan bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.[14]

Dalam konteks Indonesia, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer juga melibatkan penyesuaian terhadap kondisi lokal dan budaya. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis yang kaya memiliki tantangan unik dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan politiknya. Prinsip-prinsip Pancasila, yang mencakup nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa, menjadi dasar bagi pembangunan politik Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan politik memastikan bahwa semua warga negara dihargai dan diakui dalam keberagaman mereka.

Dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer di Indonesia memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Seluruh pihak harus bekerja sama untuk membangun budaya politik yang berorientasi pada integritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam politik juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa nilai-nilai ini ditanamkan secara mendalam dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer tidak hanya melibatkan aspek praktis dalam pengambilan keputusan dan tindakan politik, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya dan kesadaran kolektif yang mendalam. Pertama-tama, para pemimpin politik harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek kehidupan politik mereka. Mereka harus menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Selain itu, lembaga-lembaga politik juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan keadilan dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.[15]

Di samping itu, pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami nilai-nilai etika dalam politik, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam mempengaruhi arah pembangunan negara. Pendidikan politik yang baik akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan moralitas dalam politik, serta memupuk semangat partisipasi aktif dalam pembangunan negara.

Selain dari perspektif internal, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer juga melibatkan hubungan dengan masyarakat internasional. Indonesia sebagai anggota komunitas global memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan di tingkat internasional. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai etika seperti diplomasi damai, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan kerja sama internasional untuk penyelesaian masalah global.

Selanjutnya, penting untuk diakui bahwa implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer merupakan proses yang terus-menerus dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait. Perubahan budaya dan kesadaran kolektif tidak terjadi secara instan, tetapi memerlukan upaya yang berkelanjutan dan

[14]Abdul Halim, 'Constructing a Political Theory Af Islamic Law in Indonesia.', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13.2 (2013), 259–70 <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.

[15]Muhammad Rizky HK, 'Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam', *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3.2 (2020), 273–86 <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2339>.

konsisten dari semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pembangunan politik yang etis dan bertanggung jawab harus dianggap sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.[16]

Selain itu, penting untuk diakui bahwa tantangan dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer tidaklah sedikit. Korupsi, nepotisme, politisasi birokrasi, dan ketidaksetaraan akses terhadap proses politik merupakan beberapa contoh dari tantangan yang harus diatasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Dalam konteks politik kontemporer Indonesia, upaya untuk menerapkan nilai-nilai etika dalam politik juga harus memperhitungkan dinamika lokal dan keberagaman budaya yang ada. Pendekatan yang tidak mengabaikan realitas lokal dan kebutuhan khusus masyarakat Indonesia akan lebih efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam membangun budaya politik yang lebih etis dan bertanggung jawab.[17]

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah atau elit politik semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat membangun sistem politik yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.[18]

IV. Penutup

Dapat disimpulkan bahwa etika politik dalam konteks Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktek politik pada zaman modern. Etika politik dalam Islam tidak hanya mencakup dimensi duniawi yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan alam semesta, tetapi juga dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Nilai-nilai etika seperti keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan persamaan menjadi landasan utama dalam politik Islam. Implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer sangat penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini melibatkan praktek kepemimpinan yang bertanggung jawab dan transparan, praktik demokrasi yang sehat dan inklusif, pengelolaan konflik yang damai, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, serta penyesuaian terhadap tantangan globalisasi dan teknologi informasi. Di Indonesia, implementasi nilai-nilai etika dalam politik kontemporer juga melibatkan penerapan prinsip Pancasila dan penyesuaian terhadap kondisi lokal dan budaya yang kaya akan keberagaman. Dalam upaya membangun budaya politik yang lebih etis dan bertanggung jawab, kerja sama antara pemerintah, lembaga politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan. Hanya dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat menciptakan sistem politik yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Azhar, Muhammad, '"Etika Politik Muhammed Arkoun"', *Jurnal Isyraqi*, no,1,10 Ju.0274 (2012), 22

Dahlan, Dewi, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Persfektif)', *Menara Ilmu*, 15.1 (2021), 42–50 <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>

Daulay, Rosul Pilihan, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kandungan Hadis Jibril (Islam, Iman Dan Ihsan)', 2021, 114

[16]M Thahir Maloko, 'Al-Daulah', *Al-Daulah*, 1.2 (2013), 50–59.

[17]Suparman Mannuhung and Andi Mattingarangau Tenrigau, 'Peran Pendidikan Islma Dalam Mewujudkan Etika Politik', *Anjdi Djemma*, 1.1 (2018), 27–35 <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article/view/102>.

[18]Dewi Dahlan, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Persfektif)', *Menara Ilmu*, 15.1 (2021), 42–50 <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>.

Farid, Ahmad, Putri Daniati, Rachmah Noor, Nuryeni Nuryeni, Armalia Putri Zuhrufa, Riska Febiana, and others, 'Karakteristik Metode Tafsir Al-Quran Secara Holistik (Studi Literatur)', *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4.3 (2023), 1709–16 <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.409>

Fitriawan, Ahmad, 'PROBLEMATIKA PENAFSIRAN AYAT-AYAT JIHAD DI ERA MODERN (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Konteks Ke- Indonesiaan Perspektif Mufassir Nusantara)', *Tesis*, 6.2 (2023), 248–65

Halim, Abdul, 'Constructing a Political Theory Af Islamic Law in Indonesia.', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13.2 (2013), 259–70 <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>

Hamzah, Herdiansyah, 'Politik Hukum Sumber Daya Alam', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 85 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11079>

Harahap, Koiy Sahbudin, Ilyas Husti, and Nurhadi Nurhadi, 'Desain Pendidikan Aqidah Spritual Dalam Hadits Dan Kurikulumnya', *Journal of Islamic Education El Madani*, 1.2 (2022), 83–98 <https://doi.org/10.55438/jiee.v1i2.28>

Hasdiana, Ulva, 'PENGANTAR ILMU POLITIK', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), 1–5 <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>

Indana, Nurul, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), 1–5 <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>

Kurniati, Kurniati, 'Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2018), 257 <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>

Maloko, M Thahir, 'Al-Daulah', *Al-Daulah*, 1.2 (2013), 50–59

Mannuhung, Suparman, and Andi Mattingarangau Tenrigau, 'Peran Pendidikan Islma Dalam Mewujudkan Etika Politik', *Anjdi Djemma*, 1.1 (2018), 27–35 <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article/view/102>

Panggabean, Ilham Budiman, and Aprilinda Martinondang Harahap, 'Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)', *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7.2 (2024), 1–15 <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>

'Quran Dan Terjemahan Kemenag', *Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI*, 2 (2019), 901

Rizky HK, Muhammad, 'Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam', *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3.2 (2020), 273–86 <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2339>

Yunie risma riyantie, *Konsep Politik Machiaveli Dalam Prespektif Etika Politik Islam*, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020, XII <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>